

STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENINGKATAN DAYA SAING UKM DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Mohammad Arfandi Adnan¹

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email; arfandiadnan1982@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the strategy of the Department of Cooperatives and Cooperatives in empowering micro, small and medium enterprises (MSMEs) that focus on the trade sector. In empowering micro, small and medium enterprises, three phases are needed, namely initial, participatory and emancipatory. The research method used is descriptive qualitative, which is to provide an appropriate description or explanation objectively related to the actual situation of the object under study. The instruments of data collection are interviews and observations in locations and documents. The results of this study indicate that the Koperindag Department's empowerment strategy in empowering small, micro and medium enterprises is not optimal. Empowerment carried out by the government at an early stage is quite instrumental by providing training and counseling. The participatory phase of the community and the government has collaborated in developing MSMEs. While in the emancipatory phase the government is still constrained by the provision of facilities and infrastructure in the development of SMEs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi Departemen Koperindag dalam memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berfokus pada sektor perdagangan. Dalam memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah, diperlukan tiga fase, yaitu inisial, partisipatif, dan emansipatoris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan deskripsi atau penjelasan yang sesuai secara obyektif terkait dengan situasi aktual objek yang diteliti. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara dan observasi di lokasi dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan Departemen Koperindag dalam memberdayakan usaha kecil, mikro, dan menengah tidak berjalan optimal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada tahap awal cukup berperan dengan memberikan

pelatihan dan konseling. Fase partisipatif masyarakat dan pemerintah telah berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM. Sementara pada fase emansipatoris pemerintah masih terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UKM.

Kata Kunci: *UMKM, Strategi, Pemberdayaan.*

PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil dan menengah (UKM) harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan masyarakat harus saling bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.

Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia dapat ditinjau dari empat aspek (Nurhajati, 2005: 2) yaitu:

1. UKM merupakan bagian terbesar dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia.
2. UKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.
3. UKM memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
4. UKM memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekspor.

Peran UKM dalam perekonomian Indonesia ternyata belum mampu meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat Internasional, utamanya di regional ASEAN. Hasil penelitian *Word Economic Forum* terhadap 59 negara termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-37 pada tahun 1999. Rendahnya daya saing ekonomi Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh sebagian besar usaha kecil antara lain pemasaran, keuangan, manajemen, teknologi, lokasi, sumberdaya manusia, dan struktur ekonomi. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi UKM sehingga sulit berkembang antara lain:

- Ketidakmampuan dalam manajemen;
- Lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan;
- Kurang berpengalaman;
- Lemahnya pengawasan keuangan.

Menghadapi persoalan-persoalan UKM yang telah dikemukakan di atas, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan daya saing ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut secara institusi ditunjukkan melalui pembentukan kementerian yang menangani UKM sejak jaman pemerintah orde baru. (Nursalam, 2010: 4). Selain itu, secara yuridis komitmen pemerintah ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Undang-undang tersebut ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui kerjasama UKM dengan Usaha Besar (Nursalam, 2010: 5-6).

Yang akan dikaji lebih mendalam adalah UKM yang beroperasi di Kecamatan Polewali. Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 9 Tahun 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/9/Bkr Tahun 2001, adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari Bank antara Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil sebagai berikut (Nursalam, 2010: 9):

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan belum dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- d. Belum memiliki izin usaha.
- e. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- f. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Usaha kecil terkonsentrasi pada beberapa usaha antara lain:

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- b. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
- c. Industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- d. Peternakan ayam, itik dan perikanan.

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No. 10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari Bank sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha menengah sebagai berikut (Nursalam, 2010: 11):

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- b. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.
- c. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll.
- d. Sudah memiliki akses pada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- e. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

- a. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
- b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;
- c. Usaha garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi;
- d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
- e. Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

Tabel 1
Jumlah UKM di Kecamatan Polewali Mandar Tahun 2016

NO	Kelurahan	Jumlah UKM
1.	Wattang	32
2.	Takatidung	39
3.	Lanora	10
4.	Madatte	8
5.	Pekkabata	30
6.	Manding	12
7.	Sulewatang	12
8.	Darma	12
Jumlah		132

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar 2016

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Sumber Data

1. *Data primer*: data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi langsung.
2. *Data sekunder*: data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang berhubungan dengan penelitian, seperti; buku-buku, literatur dan artikel yang berhubungan dengan objek dan permasalahan penelitian, dokumen, dan laporan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan cara-cara yang dipilih dalam memperoleh data melalui (Robert, K. Yin, 2006):

- a. *Wawancara*: mengajukan serangkaian pertanyaan terhadap informan yang dianggap mengetahui informasi yang relevan sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan mendatangi langsung informan dan mencatat hasil dari wawancara tersebut.

- b. *Obeservasi*: kegiatan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang relevan. Penulis melakukan observasi langsung dengan mengunjungi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Polewali dan beberapa UKM di Kecamatan Polewali, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
- c. *Studi Dokumen*: cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, karyatulis ilmiah.

Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri: pengumpulan informasi, reduksi data (*data reduction*), penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fase Inisial

Berdasarkan fokus penelitian dalam fase ini terbagi dalam beberapa indikator sebagai tolak ukur keberhasilan dalam membangun dan mengembangkan UMKM di daerah Kecamatan Polewali. Adapun indikator yang dimaksud adalah pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan yang dirumuskan terkait dengan pengembangan UMKM. Pelatihan dalam hal ini menjadi strategi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Polewali dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM.

Pelatihan merupakan investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan usaha mikro mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki sekarang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro menjadi jenis usaha yang paling antusias dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperindag Kecamatan Polewali dibandingkan jenis usaha kecil dan menengah. Sementara anggaran menurut Kepala Bidang UMKM Dinas Koperindag Kecamatan Polewali yang digunakan untuk melaksanakan pelatihan dialokasikan dari APBN dan APBD.

Mengenai hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperindag Kecamatan Polewali dalam pengembangan UMKM lebih kepada peran pelaku usaha yang tidak stimultan dalam pelatihan tersebut. Dengan kata lain bahwa masyarakat tertarik mengikuti pelatihan yang dilaksanakan hanya sekedar untuk memperoleh honor, tetapi tidak menerapkan hasil inovasi pelatihan tersebut. Sehingga pelatihan yang diadakan tersebut terkesan formalitas belaka dan dijadikan lahan pemborosan anggaran daerah.

Selain pelatihan, juga ada penyuluhan yang berguna untuk menambah wawasan dari SDM terkait pengembangan UMKM. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kecamatan Polewali bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran, baik dalam bentuk kemasan maupun isi produk. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan melakukan koordinasi ke pasar-pasar daerah. Bahkan menurut Kabid UMKM Dinas Koperindag Kecamatan Polewali menjelaskan adanya pergeseran paradigma UMKM yaitu sebagai berikut.

“Jadi perubahan paradigma UKM selama ini yang mengandalkan hanya modal sekarang sudah paradigma baru modal bukan segala-galanya tapi sekarang dengan skill yang ada adalah modal, bahwa UKM itu perlu integritasnya bahwa saya ini bisa, faktor modal kan ada 2, yaitu ada yang sifatnya nyata dan ada yang tidak.” (*Wawancara*, 23 Februari 2017)

Selain pelatihan dan penyuluhan, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam memberdayakan UMKM. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Koperindag Kecamatan Polewali dijadikan sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan UMKM. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Menurut Kabid UMKM Dinas Koperindag Kecamatan Polewali saat ini perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah langsung ditangani oleh Camat. Sementara untuk modalnya semua jenis UMKM yang telah dibiayai pelatihan yang biasanya memperoleh sarana dan prasarannya dalam bentuk uang kini diganti menjadi produk atau barang-barang.

Keluarnya peraturan pemerintah tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sehingga dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut saat ini Camat memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat atau pelaku usaha dalam pembuatan surat izin usaha. Adapun tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Polewali Mandar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan oleh Kepala Bidang UMKM Dinas Koperindag Polewali Mandar adalah sebagai berikut;

“Pertama untuk memberdayakan UMKM yang ada di Polewali Mandar ini agar dapat bersaing dengan produk lain. Yang kedua tidak membuat jarak birokrasi kepada masyarakat, jadi kita ini terbuka dari dinas dan juga sering memberikan informasi kepada masyarakat.” (*Wawancara*, 23 Februari 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperindag Polewali Mandar bertujuan untuk meningkatkan daya saing terhadap produk lain. Selain itu adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah membuat jarak antara birokrasi dengan masyarakat semakin sempit sehingga tidak ada lagi kecanggungan oleh masyarakat kepada pemerintah. Bahkan dengan kebijakan yang ada sebagai media dan pedoman dalam memperoleh informasi terkait perkembangan UMKM di Kabupaten Polewali Mandar.

Fase Partisipatoris

Fase partisipatoris merupakan proses pemberdayaan yang berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada tahap ini peran pemerintah semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menuju kemandirian. Ini bisa dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai pelaku usaha yang cukup berminat pada setiap pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Polewali Mandar. Berikut hasil wawancara Kabid UMKM yang menjelaskan sebagai berikut:

“Pelatihan yang baru-baru ini secara pelatihan kewirausahaan daerah pesisir dua kali itu partisipasinya yah pesertanya lebihhanki, adanya antusias masyarakat mengikuti pelatihan bagus apalagi pada waktu dalam pelatihan itu kita juga membekali masyarakat dengan biaya-biaya, karena biaya transparan kita tanggung.” (*Wawancara*, 23 Februari 2017)

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag di beberapa kelurahan di Kecamatan Polewali berjalan efektif. Ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pelaku usaha yang cukup tinggi dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan. Selain itu, dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut Dinas Koperindag memberikan tunjangan biaya transportasi kepada peserta sehingga masyarakat cukup berpartisipasi dan begitu antusias. Selanjutnya beliau menjabarkan respon yang cukup baik dari masyarakat, lebih jelasnya berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau respon kemarin dari hasil musrenbang kecamatan itu jumlah permintaan dari semua kecamatan itu rata-rata dia minta pelatihan, jadi seluruh kecamatan di kabupaten Polewali Mandar ini rata-rata dia minta pelatihan, karna mengenai responsnya begitu besar.” (*Wawancara*, 23 Februari 2017)

Sementara tingkat antusiasme masyarakat juga cukup tinggi dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan dari Dinas Koperindag. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil musrenbang terdapat beberapa kecamatan yang mengajukan dan meminta pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan di kecamatannya masing-masing. Salah satu pelatihan yang pernah dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Polewali Mandar dan berhasil peneliti temui adalah pelatihan tentang abon dan amplang. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan tentang peningkatan produksi hingga pemasarannya. Berikut hasil wawancara Ibu Sumi salah satu warga (pelaku usaha abon dan amplang) dan ibu juju (pelaku usaha kue) yang menjadi peserta pelatihan:

“Iya, pemerintah pernah melakukan pelatihan mengenai abon dan amplang. Pelatihan ini dilakukan selama dua hari yaitu pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran, dan pelatihan bagaimana cara membuat abon dan amplang yang bagus. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ini saya terlibat aktif.” (*Wawancara*, 2 Maret 2017)

“Pemerintah sangat membantu saya dalam pelatihan ini mengenai pembuatan kue dan pengemasan isi produk agar terlihat menarik di pasaran. (*Wawancara*, 2 Maret 2017)

Selanjutnya Ibu Sumi menjelaskan:

“Saya pernah dibantu oleh pemerintah berupa mesin, alat pres dan oven. Bantuan ini sangat membantu usaha saya dalam hal pengemasan abon dan amplang saya terlihat bagus dan berharap ke depannya harga abon dan amplang saya ini bisa naik dan pendapatan saya bisa bertambah. Semua ini bisa saya lakukan setelah mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah tentang bagaimana cara mengemas produk agar lebih menarik yang berdampak pada harga abon dan amplang saya.” (*Wawancara*, 2 Maret 2017)

Adapun harapan masyarakat sebagai pelaku usaha khususnya abon dan amplang adalah adanya inovasi terhadap kemasan sehingga dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dengan demikian dapat menambah pendapatan bagi pelaku usaha abon dan amplang dan meningkatkan nilai produksinya.

Fase Emansipatoris

Pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usaha-usahanya. Oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Polewali Mandar harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan usaha-usaha ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan pengembangan sepenuhnya dan

seluas-luasnya dari dinas terkait. Kondisi dari usaha-usaha di bidang perdagangan saat ini belum bisa menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari usaha yang ada masih belum menemukan kemampuannya untuk memberdayakan usahanya sendiri dilihat dari banyaknya usaha yang sudah tidak aktif.

Secara khusus Kabupaten Polewali Mandar cukup memiliki peluang dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM sebagai sebuah langkah strategis meningkatkan PAD. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menganalisis strategi yang diambil oleh Dinas Koperindag Kabupten Polewali Mandar dalam memberdayakan UMKM. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperindag Kabupaten Polewali Mandar dalam mengembangkan UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak berjalan optimal. Strategi yang telah dirumuskan sudah diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, pemberdayaan UMKM tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat terlaksananya pengembangan usaha tersebut. Terutama paradigma masyarakat sebagai pelaku usaha yang cenderung masih pragmatis dalam memandang strategi pemberdayaan. Sehingga secara garis besar pemberdayaan UMKM di Kecamatan Polewali dapat dikatakan belum berjalan optimal.
2. Adapun hasil penelitian fase inisial menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Koperindag Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun formulasi strategi dalam memberdayakan sekaligus mengembangkan UMKM melalui pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan. Sedangkan pada fase partisipatoris menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Kecamatan Polewali cukup tinggi. Ini ditandai dengan minat dan keikutsertaan pelaku-pelaku UMKM yang besar pada tiap pelatihan/penyuluhan yang diadakan. Sementara fase emansipatoris menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Polewali Mandar pada fase ini sudah semakin berkembang dengan jumlah asset, volume, dan sisa hasil usaha yang cukup besar.

SARAN DAN REKOMENDASI

1. Dinas Koperindag sebagai penanggungjawab dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Polewali Mandar seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan ataupun penyuluhan dapat berjalan optimal dan menghasilkan *output* yang sesuai dengan harapan.
2. Masyarakat sebagai pelaku UMKM seharusnya membuka pemikiran untuk tidak bersikap pragmatis dalam menerima pemberdayaan yang diberikan pemerintah. Dengan adanya pelatihan maupun penyuluhan sebaiknya digunakan sebagai kesempatan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan dan sebaiknya pemerintah menyediakan UPTD bagi para pelaku usaha UKM untuk memproduksi usaha mereka sehingga bisa menghemat tenaga, listrik dan waktu terkait pengembangan produk usaha yang lebih inovatif dan berdaya saing

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R. dan Emory C. William. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. Jilid I Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga.
- Faulkner, David. 1997. *Strategi Kompetitif*. Yogyakarta: ANDI.
- Hanger, J. David. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prijono dan Pranarka. 1995. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Randy dan Riant. 2007. *Manajemen Pemberdayaan “Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat”*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Rangkuti, Freddy. 1997. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisni: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiana, L. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sito, Arifin. 1996. *Koperasi, Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Spillane, James J, S.J. 1994. *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekartawi, 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan, dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Rajawali.

Suharyanto, Hadriyanus., 2005. *Administrasi Publik, Entrepreneurship, Kemitraan, dan Reinventing Government*. Yogyakarta: Media Wacana.

Suhendra. 2000. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Alfabeta.

Sumodinigrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tambunan, Tulus. 2000. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Tripomo, Tedjo & Udan. 2005. *Manajemen Strategi*. Bandung: Rekayasa Sains.

Van Den Ban. d.k.k. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.